



Kuasa Hukum Bantah Gidot Terlibat Kasus Proyek Bodong

► Beralasan Dana Bersumber dari APBN

Zakarias
Kuasa hukum Pemkab Bengkayang

Kasus bodong sehingga bobolnya Bank Kalbar Rp8,8 miliar tidak ada kaitannya dengan pak Gidot, karena proyek ini bersumber dari APBN. Yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Heri Murdianto dan pihak bank yang mengeluarkan uang untuk kontraktor.

BENGKAYANG, SP - Kuasa hukum Pemkab Bengkayang, Zakarias menepis dugaan terlibatnya Bupati Bengkayang non aktif, Suryatman Gidot dalam kasus proyek bodong yang juga melibatkan salah seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bengkayang, Heri Murdianto.

oleh Kementerian PDPT. Padahal yang membuat kontrak HM bersama rekan-rekannya Pada saat mereka ke kementerian mata anggaran tidak ada,

komunikasi tersebut Bank Kalbar menyetujui anggaran awal 60 persen dari pagu dana sebesar Rp8,8 miliar.



Menurut Zakarias kasus proyek bodong yang berasal dari kementerian tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan Suryadman Gidot. Kasus ini diketahui juga menyeret Kepala Cabang Bank Kalbar Bengkayang, Mumammad Rajali.

“Kasus bodong sehingga bobolnya Bank Kalbar Rp8,8 miliar tidak ada kaitannya dengan pak Gidot, karena proyek ini bersumber dari APBN. Yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Heri Murdianto dan pihak bank yang mengeluarkan uang untuk kontraktor,” tegasnya, Selasa (24/2).

Menurut dia, kasus proyek bodong tersebut bermula saat Heri Murdianto menawarkan proyek dari Kementerian PDPT ke kontraktor. Kontrak proyek juga dibuat sendiri oleh HM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kontrak di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dinsos P4AMD) Kabupaten Bengkayang.

“Seolah-olah kontrak tersebut dibuat langsung

seh-

ingga pekerjaan yang mereka kerjakan tidak bisa diairkan.

Dalam hal ini Pak Suryadman Gidot tidak ada kaitannya sama sekali. Bahkan beliau tidak tahu karena tidak menyangkut APBD,” tegas Zakarias.

Menurut Zakarias untuk memuluskan rencananya agar pinjaman disetujui oleh Bank Kalbar, HM berkomunikasi dengan pimpinan Bank Kalbar, Muhammad Rajali. Dari

“Setelah selesai kontrak para kontraktor mengajukan pencairan uang

dari sisa pagu dana ternyata. Saat mereka (kontraktor) menghadap ke kementerian, mata anggaran untuk proyek tidak ada, ternyata itu direkayasa HM,” tutur Zakarias.

Sementara itu salah seorang kontraktor yang mengerjakan salah satu proyek yang bermasalah, Putra Perdana mengaku menjadi korban. “Saya sudah beberapa kali dipang-

gil menjadi saksi,” ungkap Putra

Putra menjelaskan awal realisasikan proyek tersebut didapatkannya dari rekan Heri Murdianto. “Proyek didapat awalnya dikenalkan dari Yusuf ke Pak Heri Murdianto selaku PPK. Memang pencairan dana juga langsung masuk ke rekening perusahaan,” ucapnya.

Atas kasus ini yang berbuntut panjang, Putra berharap ada solusi dari Pemkab Bengkayang mau-

pun Pemprov Kalbar. “Pasalnya menurut Putra, ia telah melakukan pengerjaan proyek dan dapat dibuktikan melalui fisik pengerjaan proyek yang juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Semoga ada solusi dari pemprov atau pemda, kami ini hanya dijadikan korban. Lagi pula semua kegiatan ini sudah kami bangun dan pembangunannya juga sudah ada manfaatnya untuk masyarakat,” pungkas Putra. **(bar/jee)**